

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar serta dibagi menjadi 33 Provinsi yang ada. Akan sangat tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada pemerintah pusat saja. Maka dibuatlah sistem otonomi daerah supaya jalannya pemerintah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah yang ada di Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta tetap berdasar pada Pancasila. Walaupun diadakan sistem otonomi, tetapi pemerintahan Indonesia tetaplah terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Jawa Barat tentunya tidak lepas dari usaha Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan visi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai Provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibukota Negara Tahun 2010. Salah satu tujuan dari visi dan misi tersebut diantaranya adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tentu tujuan akhirnya untuk mensejahterakan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada bidang-bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khusus di bidang ekonomi, pembangunan harus lebih

ditingkatkan secara bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatkan daya beli secara merata dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah-daerah di Indonesia memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang berasal dari keuangan daerah setempat. Keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan UU No.22/99 pasal 79 terdiri dari hasil Retribusi Daerah, Pajak Daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan milik Daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang terpisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan dan merupakan output dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari PDRB merupakan sumber kekayaan PAD. Proporsi Pendapatan Asli Daerah dalam seluruh penerimaan daerah masih rendah bila dibandingkan dengan penerimaan bantuan Pemerintah Pusat. Maka ketika PDRB Kota yg dihasilkan besar jumlahnya maka sumber kekayaan PADnya besar, keadaan ini menyebabkan perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi keuangan

daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kota sangat disadari oleh Pemerintah Kota.

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah)

No	Nama Kota/Kabupaten	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kab. Bekasi	197.163	205.967	216.228
2	Kota Bandung	138.960	149.580	161.227
3	Kab. Karawang	126.748	132.453	140.782
4	Kab. Bogor	117.339	124.488	132.085
5	Kab. Bandung	61.100	64.701	68.804

Sumber : BPS Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas yang di keluarkan oleh BPS Jawa Barat hasil penerimaan PDRB daerah Kota Bandung cukup besar tetapi berada di urutan no 2 dengan nominal 138.960 juta rupiah setelah Kab. Bekasi . Hal ini dikarenakan ternyata tenaga kerja di sektor jasa yang tidak merata di bandingkan dengan produksi ekonominya selain itu banyaj jumlah penduduk yang tidak produktif di kota bandung seperti pengguran.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2003) dalam bukunya “Perpajakan” menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Jaka Sriyana, 1999:4).

Kota Bandung merupakan kota pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai kota yang terus menerus mengembangkan ekonomi diantaranya yaitu sektor industri atau perusahaan yang cukup banyak menjadi prospek pajak daerah cukup potensial untuk waktu yang akan datang. Dilihat dari berbagai aspek banyaknya sektor industri, hotel, restoran hiburan dan sebagainya, ini bisa meningkatkan pendapatan pajak di Kota Bandung. Oleh karena itu obyek Pajak Daerah akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan badan usaha dan perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Bandung.

Selain itu Kota Bandung yang dekat dengan Ibu Kota para wisatawan asal Jakarta dengan mudah berkunjung untuk belanja dan berlibur ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bandung, ditambah dengan warga pribumi yang tingkat pendapatan tinggi mampu mendongkrak pendapatan asli daerah khususnya dari sektor jasa dan pariwisata. Presentase perolehan Pajak Daerah dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun ke tahun ini

memberikan indikasi betapa besarnya potensi Pajak Daerah. Dengan berbagai jenis pajak yang ada memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah beserta badan usaha yang ada. Berikut data Perbandingan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2014-2016 :

Tabel 1.2
Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah 5 Terbesar Kab/Kota di Jawa Barat
Tahun 2014-2015 (dalam Ribu Rupiah)

No	Nama Kota/Kabupaten	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Kota Bandung	1.399.598.856	1.494.147.377	1.709.807.582
2	Kab. Bekasi	1.113.294.365	1.385.813.525	1.463.289.721
3	Kota Bekasi	845.771.913	1.030.224.005	1.240.204.065
4	Kota Karawang	554.228.364	710.742.585	633.184.029
5	Kab. Depok	494.172.635	618.870.362	684.161.218

Sumber : BPS Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas yang di keluarkan oleh BPS Jawa Barat penerimaan pajak daerah Kota Bandung memiliki pendapatan pajak yang besar terhadap penerimaan asli daerah (PAD), penerimaan pajak daerah menyumbang 56,7% terhadap total PAD. Hal ini terlihat pada penerimaan pajak daerah pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah Kota Bandung yaitu sebesar Rp 1.709.807.582 sekaligus pendapatan pajak yang paling terbesar di jawa barat dibandingkan kota-kota lainnya. Dengan besarnya penerimaan pajak daerah diharapkan dapat memaksimalkan pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan PDRB di Kota Bandung yang selalu meningkat dari tahun 2014 sebesar 138.960 juta rupiah dan tahun 2016 sebesar 161.227 juta rupiah, peningkatan ini karena hasil dari potensi-potensi daerah di Kota Bandung dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu dilihat dari kondisi jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 2.470.802 jiwa dan tahun 2016 sebanyak 2.490.622 jiwa yang setiap tahunnya meningkat, banyaknya masyarakat luar Kota Bandung yang menetap.

Ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk di Kota Bandung, ditambah lagi dengan jumlah perusahaan yang bertambah banyak di Kota Bandung yang berjumlah 475 unit perusahaan pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 sebanyak 850 unit perusahaan. Karena Kota Bandung sebagai pusat perdagangan besar di Jawa Barat, banyaknya investor-investor asing maupun local yang berinvestasi atau para penduduk yang berurbanisasi untuk sekedar mencari usaha atau bahkan menetap dan mendirikan usaha atau berdagang di Kota Bandung. Dengan demikian mengapa PDRB dan Penerimaan Pajak di kota Bandung tidak berada di urutan No 1 apakah yang menyebabkan ini terjadi, atukah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, secara tidak langsung hal tersebut akan bisa menurunkan pendapatan Pajak Daerah untuk pembangunan daerah .

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah melalui penelitian berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG**

MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA BANDUNG’’

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan klasifikasi dari identifikasi masalah yang telah di rumuskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan perkembangan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Perusahaan dan Kebijakan Daerah secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian diatas mengenai kajian yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi dan untuk melihat prospek/perkiraan penerimaan pajak daerah di tahun berikutnya di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan, variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Perusahaan dan Kebijakan Daerah terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari peneliti ini dapat Memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan sektor Ekonomi Publik dan Ekonomi Daerah serta dapat memberikan pengetahuan, khususnya terkait dengan Pajak Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, instansi pemerintah, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a) Sebagai pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai Penerimaan Pajak Daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.
- b) Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, serta menambah wawasan tentang Penerimaan Pajak

Daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak daerah..

- c) Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Bidang Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah, dalam mengelola pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah sehingga Pemerintah bisa lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan seharusnya bisa lebih mempermudah untuk membayar pajak daerah.